

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang komprehensif yang mengatur semua aspek kehidupan manusia yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Salah satu bidang yang diatur adalah masalah aturan atau hukum, baik yang berlaku secara individual maupun sosial, atau lebih tepatnya Islam mengatur kehidupan bermasyarakat. Islam juga sebagai agama yang realistis yang artinya hukum Islam tidak mengabaikan kenyataan dalam setiap perkara yang dihalalkan dan yang diharamkannya, juga tidak mengabaikan realitas dalam setiap peraturan dan hukum yang ditetapkannya, baik individu, keluarga, masyarakat, negara maupun umat manusia.<sup>1</sup>

Manusia dalam memenuhi kebutuhannya tidak dapat bekerja sendiri, haruslah ada interaksi atau bermasyarakat dengan orang lain. Karena tidak dapat dipungkiri manusia adalah makhluk sosial. Oleh karena itu, kerjasama antara pihak yang satu dengan yang lainnya guna mementingkan taraf perekonomian dan kebutuhan hidup manusia serta keperluan lainnya yang tidak bisa diabaikan. Kerjasama dapat memberikan manfaat bagi umat manusia serta kerabat-kerabat dengan cara yang ditentukan oleh kedua belah pihak seperti mengadakan transaksi atau perjanjian.<sup>2</sup> Perjanjian mempunyai arti dalam kehidupan bermasyarakat. Perjanjian merupakan dasar dari sekian banyak aktivitas keseharian kita. Melalui

---

<sup>1</sup> Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor : Ghalia Indonesia, 2012) hlm. 3

<sup>2</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007) hlm..4

akad pula berbagai kegiatan bisnis dan usaha kita dapat dijalankan. Karena akad dapat memfasilitasi setiap orang dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingannya yang tidak dapat dipenuhi sendiri tanpa bantuan orang lain.

Perkembangan teknologi dan internet tidak selamanya menghasilkan hal-hal positif. Selain memberikan peluang dalam pemanfaatan teknologi untuk memudahkan dan memperbaiki pendidikan, bisnis, dan layanan pemerintah, berbagai permasalahan juga muncul berkaitan dengan manusia yang menggunakannya. Perubahan besar itu juga terjadi pada cara berpikir masyarakat, baik dalam hal usaha pemecahan masalah, perencanaan, maupun dalam hal pengambilan keputusan yang berakibat perkembangan teknologi tersebut, telah banyak mempengaruhi terhadap cara pandang masyarakat terhadap etika dan norma-norma kehidupan.<sup>3</sup> Pada tahun 2015 data survey *Bussines Software Alliance* (BSA) mencatat 25% pengguna software di dunia tidak berlisensi pada industri perbankan, asuransi dan sekuritas.<sup>4</sup> Pembajakan bagi sebagian besar masyarakat adalah hal yang sangat tidak diperhatikan bahkan bagi kalangan masyarakat baik itu kalangan pelajar, mahasiswa, karyawan kantor, bahkan instansi pendidikan atau lembaga lainnya, pelanggaran hak cipta intelektual ini sudah menjadi suatu hal yang sah-sah saja dan lumrah untuk dilakukan.

Dalam dunia pendidikan, software seperti *Microsoft Office*, *Adobe*, *Corel Draw* dan yang paling umum adalah *Operating System Windows*, adalah contoh software yang paling sering dipakai oleh para pelajar, mahasiswa, dosen, dan perangkat pendidikan lainnya. Seperti halnya pada bidang pendidikan, kebiasaan masyarakat Indonesia yang cenderung permisif terhadap pembajakan menjadikan

---

<sup>3</sup> Teguh Wahyono, *Etika Komputer dan Tanggung Jawab Profesional di Bidang Teknologi Informasi* (Yogyakarta : Andi Offset, 2009) hlm. 140

<sup>4</sup> <http://globalstudy.bsa.org/2016/index.html> diakses pada 05/04/2017

dunia pendidikan dipenuhi dengan pelanggaran hak milik intelektual yang seharusnya dijunjung tinggi oleh para mahasiswa.

Islam memandang aktivitas ekonomi secara positif. Semakin banyak manusia yang terlibat dalam aktivitas ekonomi maka semakin baik, sepanjang tujuan dari prosesnya sesuai dengan syariat Islam. Hal semacam ini berarti ketakwaan kepada Tuhan tidak berimplikasi pada penurunan produktivitas ekonomi, tetapi aktivitas perekonomian akan berimplikasi pada suatu kekayaan, dimana kekayaan dapat mendekatkan manusia kepada Tuhan selama diperoleh dengan cara-cara yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.<sup>5</sup> Salah satu bentuk sistem ekonomi yang ada dalam Islam adalah muamalah, yang merupakan salah satu bentuk ibadah dalam rangka mencari rizki dari ridha Tuhan guna memenuhi kebutuhan hidup, hal tersebut tidak lepas dari hubungan sosial antar manusia.

Dalam beraktivitas sehari-hari, manusia banyak melakukan aktivitas muamalat yang kadang kita tidak memperhatikan hukum syar'inya, karena hal tersebut sudah menjadi kebiasaan di lingkungan kehidupan masyarakat, dalam hal ini adalah sewa menyewa. Dalam hukum Islam, sewa menyewa disebut dengan Ijārah yang artinya sewa-menyewa atas manfaat tertentu yang diperbolehkan dengan nilai kompensasi tertentu<sup>6</sup>, atau dengan kata lain adalah jual beli manfaat.

Sewa menyewa (*ijārah*) yang disyari'atkan Islam salah satunya tidak ada unsur penipuan, dan yang dapat merugikan pihak lain. Oleh karena itu, dalam

---

<sup>5</sup> Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam*, Cet ke-3 (Yogyakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2011), Hlm. 14

<sup>6</sup> Dimyauddin Djuaini, *Pengantar Fiqh Muamalat*, Cet. Ke-1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2008), hlm. 153.

menjalankan suatu kegiatan muamalah seperti sewa-menyewa diperlukan beberapa syarat yang harus di penuhi, yaitu:<sup>7</sup>

1. Persewaan tersebut harus pada pemanfaatan barang
2. Manfaat barang yang disewakan harus diketahui. Tidak boleh persewaan atas barang yang telah disewakan.
3. Barang yang disewakan harus barang yang dapat diserahkan atau dapat dipinjamkan. Tidak boleh menyewakan barang-barang yang tidak ada wujud dan bukan miliknya.
4. Manfaat yang disewakan ada dua: manfaat menggunakan waktu dan pekerjaan.

Dalam teori *Nature* (alami), dorongan biologis merupakan faktor pendorong manusia. Secara naluriyah, manusia memiliki dorongan positif dan negatif dalam berinteraksi dengan sesamanya yang dapat mengarah pada kerjasama atau konflik.<sup>8</sup> Mengacu pada faktor tersebut mengenai syarat yang harus dipenuhi manusia untuk melakukan sebuah upaya mencari rizki yang diridhoi oleh Tuhan melalui usaha sewa-menyewa, kemudian dikombinasikan dengan yang dimaksud teori *Nature* untuk melakukan suatu perbuatan. Akan tetapi dalam perbuatan tersebut terkadang manusia tidak mengindahkan apa yang telah diatur oleh hukum yang ada dan pada akhirnya kegiatan tersebut mengarah kepada hal yang dapat merugikan orang lain.

Masalah utama dalam pembajakan adalah masalah sikap mental (*attitude*) masing-masing individu. Ini menunjukkan bahwa *attitude* yang kurang sehat akan

---

<sup>7</sup> Ahmad Isa 'Asyur, *Fiqh Islam Praktis* Bab: Muamalat (Solo: CV Pustaka Mantiq, 2012), hl.98.

<sup>8</sup> Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat, Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial Dan Pekerjaan Sosial* (Bandung: PT.Rafika Aditama, 2009), hlm. 222.

mendorong melakukan pembajakan perangkat lunak, dan sebaliknya semakin meningkatnya *attitude* yang sehat dari setiap individu, akan sangat mendukung terciptanya penegakan hukum di berbagai bidang termasuk hak kekayaan intelektual.

Dengan demikian, untuk mengatasi masalah pembajakan diperlukan pendidikan dan pelatihan yang dimulai dari tahap yang lebih dini misalnya dari mulai sekolah dasar. Salah satu materi dalam pendidikan tersebut adalah bagaimana membedakan barang yang orisinal dan barang bajakan, sikap atau mental yang tidak terhormat apabila menggunakan atau membeli barang/produk hasil pembajakan tersebut.

Tidak sedikit *software windows* yang disewakan merupakan jenis *software windows* yang sudah digandakan (bajakan). Dalam hal ini, yang menjadi pertimbangan penyedia jasa sewa tersebut adalah mahalnnya *software windows* yang berlisensi original. Oleh karena, itu pemilik persewaan *software* terlebih dahulu menggandakan *software windows* yang akan dijadikan objek transaksi sewa menyewa. Hal ini dilakukan bukan saja karena mahalnnya *software windows* yang original akan tetapi mengurangi resiko terhadap *software windows* original yang harganya dinilai sangat mahal. Padahal dalam praktek sewa menyewanya tersebut terdapat unsur pelanggaran, dimana praktek sewa menyewanya bertentangan dengan aturan pemerintah dan fatwa majelis ulama yang sudah ditetapkan dalam Fatwa MUI Nomor 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang Hak Cipta dan Hak Kekayaan Intelektual.

Dalam kaitannya dengan Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual Allah berfirman dalam Al-Qur'an :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ

أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

*Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui. (QS. A-Baqarah [2] 188)*

Majelis *Majma' Al-Fiqh Al-Islamy* menyebutkan bahwa secara umum, hak atas suatu karya ilmiah, hak atas merek dagang dan logo dagang merupakan hak milik yang keabsahannya dilindungi oleh syariat Islam. Dan khususnya di masa kini merupakan `urf yang diakui sebagai jenis dari suatu kekayaan di mana pemiliknya berhak atas semua itu. Boleh dikomersilkan dan merupakan komoditi.<sup>9</sup> Dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia disebutkan bahwa hak cipta adalah: Hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undang yang berlaku. Pengertian hak cipta yang disebutkan dalam fatwa ini merujuk kepada undang-undang hak cipta yang ada di Indonesia.

Praktek sewa menyewa *software windows* sebenarnya berseberangan dengan aturan yang dibuat oleh pemerintah, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dijelaskan dalam Pasal 9 ayat (3), bahwasanya “Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta

---

<sup>9</sup> Agus Suryana "Al-Mashlahah Jurnal Hukum Pranata Sosial" Hak Cipta Perspektif Hukum Islam. Hlm. 251

dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan”

Pada praktek sewa menyewa, software windows menggunakan software bajakan, artinya bahwa bisa dikenakan pelanggaran terhadap Pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual. Bahwasanya, Penggandaan sebanyak 1 (satu) salinan atau adaptasi Program Komputer yang dilakukan oleh pengguna yang sah dapat dilakukan tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta jika salinan tersebut digunakan untuk:

- a. penelitian dan pengembangan Program Komputer tersebut; dan
- b. arsip atau cadangan atas Program Komputer yang diperoleh secara sah untuk mencegah kehilangan, kerusakan, atau tidak dapat dioperasikan.<sup>10</sup>

Penjelasan dari pasal tersebut adalah bahwasanya software *windows* diperbolehkan untuk digandakan dengan ketentuan bahwa *software windows* tersebut digunakan sebagai dokumentasi pribadi, bukan untuk dikomersilkan. Kemudian faktor yang mendukung terus berjalannya praktek sewa-menyewa *software windows* juga disebabkan tidak adanya tindakan tegas dari penegak hukum terhadap pelanggaran yang terjadi dalam praktek sewa menyewa *software windows*.

Masih berjalannya praktek sewa menyewa (*Ijārah*) *software windows* dirental Grand Computer menunjukkan bahwasanya seolah-olah kegiatan tersebut merupakan suatu kegiatan legal, padahal kegiatan tersebut jelas melanggar Undang-undang yang disahkan oleh pemerintah dan dalam pandangan Islam

---

<sup>10</sup> Pasal 45 ayat 1 a-b Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014



kegiatan seperti itu tidak diperbolehkan, karena tidak memenuhi syarat dari kegiatan sewa-menyewa, dimana barang yang menjadi objek transaksi merupakan barang yang tidak menjamin kehalalannya.

Pada dasarnya, hukum berfungsi untuk menciptakan aturan-aturan sosial, dan sanksi juga digunakan sebagai alat untuk mengontrol mereka yang menyimpang dari aturan-aturan sosial yang ditetapkan<sup>11</sup>, akan tetapi keadaan masyarakat ini berlangsung cukup lama, dan tidak sedikit dilakukan oleh kaum intelektual muslim yang mengerti akan dasar hukum tindakan tersebut, dan praktek seperti ini sudah jelas melanggar aturan. Dengan melihat latar belakang masalah tersebut, dimana praktek sewa-menyewa menarik untuk diteliti dan penelitian ini akan di fokuskan pada perspektif hukum ekonomi syariah.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, yang menjadi rumusan masalah sebagai berikut ;

1. Bagaimana pelaksanaan sewa-menyewa perangkat lunak (*software*) komputer di Grand Computer Bekasi?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek sewa-menyewa (*ijarah*) perangkat lunak komputer di Grand Computer Bekasi?

## **C. Tujuan Penelitian**

Secara garis besar penelitian ini bertujuan untuk memberikan sumbangsih pemikiran tentang penerapan hukum ekonomi syariah dalam keseharian bermuamalah, juga untuk memperkaya khazanah keilmuan serta untuk penyelesaian studi penulis di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam

---

<sup>11</sup> Widianingsih, dkk, *Pendekatan Sosial Terhadap Hukum* (Jakarta: Bina Aksara, 2008), hlm. 254



Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. Sementara itu lebih spesifiknya penelitian ini dilakukan untuk tujuan memahami dan mendalami tentang:

- a) Mengetahui mekanisme komersialisasi perangkat lunak komputer tidak berlisensi pada pelaksanaan sewa-menyewa (*Ijārah*) *software* komputer.
- b) Menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan sewa-menyewa (*Ijārah*) perangkat lunak komputer tanpa lisensi di Grand Computer Kota Bekasi.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Secara teoritis kegunaan dari penelitian ini adalah untuk menambah rujukan atau referensi tentang hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual terutama tentang jasa *install ulang* perangkat lunak. Sedangkan secara praktisnya manfaat dari penelitian ini adalah untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada umat Islam serta diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan terhadap kajian hukum ekonomi syariah. Selain itu juga memberikan pengetahuan pada masyarakat pada umumnya, tentang jasa *install ulang* perangkat lunak.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

##### **1. Studi Terdahulu**

Studi terdahulu merupakan studi yang sebelumnya sudah dilakukan namun digunakan untuk mempertajam arah studi utama. Studi terdahulu dijadikan referensi karena kelayakan penelitian yang berkenaan dengan prosedur penelitian dan hal lainnya masih belum jelas. Dengan demikian, studi terdahulu bisa saja menghasilkan perubahan-perubahan prosedur penelitian, meningkatkan pengukuran penelitian, meningkatkan kepercayaan asumsi, dan menghindari pengulangan atau duplikasi dari penelitian yang telah ada.

Literatur yang menjelaskan mengenai sewa menyewa ada dalam buku yang ditulis Ifrosin yang berjudul *Fiqh Adat, Tradisi Masyarakat dalam pandangan Fiqh* menyatakan bahwa tidak boleh menyewakan sesuatu untuk digunakan hal yang haram.<sup>12</sup> Kemudian dalam salah satu buku lain yang ditulis oleh Dimyauddin Djuaini yang berjudul *Pengantar Fiqh Muamalat* dijelaskan bahwasanya *ijārah* (sewa menyewa) bisa berhenti, karena ada salah satu keinginan dari salah satu pihak yang mengakhirinya, atau juga karena aset yang menjadi objek sewa rusak dan sudah tidak mampu mendatangkan manfaat bagi penyewa dan juga karena sudah selesai masa perjanjiannya.<sup>13</sup>

Berdasarkan hasil kajian terhadap penelitian yang sudah dikaji, maka yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yang pada dasarnya ada kesamaan membahas perangkat lunak (*software*), akan tetapi pendekatannya dan penekanannya berbeda. penelitian yang dilakukan Putra Rio Mamduh Arahman memfokuskan pada hukum positif yang berlaku dan kedudukan hukum tersebut, sedangkan penyusun difokuskan pada objek akad yang disewakan, pelaku hukum dan faktor pengaruh praktek sewa menyewa *software windows*.

Selain itu penelitian lain yang sudah pernah dikaji penelitian yang dilakukan Endhar Frayoga yang difokuskan pada keterkaitan perangkat lunak dengan pembajakan, upaya dalam penanggulangnya, faktor-faktor yang mempengaruhinya baik itu dampak positif maupun dampak negatifnya.

No	Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian

<sup>12</sup> Ifrosin, *Fiqh Adat, Tradisi Masyarakat Dalam Pandangan Fiqh* (Bandung: Mu'jizat, 2007) hlm, 47

<sup>13</sup> Dimyauddin Djuaini, *Pengantar Fiqh Muamalat...* 161.

1)	Putra Rio Mamduh (Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Perangkat Lunak Komputer di Daerah Istimewa Yogyakarta Menurut UU Nomor 28 2014)	Hukum positif yang berlaku dan objek yang dikaji perangkat lunak namun tidak secara spesifik	Teori dan metode pendekatan pada permasalahan	Perubahan pada delik UUHC yang tidak sesuai dengan kondisi saat ini
2)	Endhar Frayoga Tindak Pidana Pembajakan Perangkat Lunak ( <i>software</i> ) Komputer Dikaitkan Dengan Hak Cipta dan Upaya Penanggulanganya	Objek pada penelitian yang dibahas	Penanggulan dari dampak positif dan negatif dalam aspek tindak pidana	Masalah pokok pada penegakan hukum positif di Indonesia tentang Hak Cipta

## 2. Kerangka Teori

Pembajakan adalah Penggandaan Ciptaan atau produk Hak Terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi<sup>14</sup>. Hak cipta merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengatur penggunaan hasil penuangan gagasan atau informasi tertentu, dan pada dasarnya, hak cipta merupakan hak untuk menyalin atas suatu ciptaan. Pemegang hak cipta mempunyai wewenang untuk membatasi penggandaan yang sah atas suatu ciptaan dan juga mempunyai masa berlaku tertentu yang terbatas.

<sup>14</sup> Undang-Undang No 28 Tahun 2014 ayat 23

Dalam sebuah hak cipta terkandung di dalamnya hak ekonomi (*haq al-iqtishadi*) dan hak moral (*haq al-adabi*). Mengenai hak ekonomi maka setiap pembuat karya cipta berhak untuk mendapatkan materi dari karya ciptanya tersebut. Hal ini seperti definisi yang disebutkan oleh Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Al-Shawi yang menyebutkan “Hak cipta adalah sejumlah keistimewaan yang dimiliki oleh seorang penulis/pengarang yang bisa dihargai dengan uang, terkadang hak ini disebut juga hak abstrak, hak kepemilikan seni/sastra atau hak-hak intelektualitas, hak ini juga berarti harga komersial dari tulisan atau karangannya, harga tersebut dibatasi oleh mutu dan keuntungan komersial yang bisa direalisasikan dengan menerbitkan hasil tulisan tersebut dan mengkomersilkannya”.<sup>15</sup> Adanya hak ekonomi ini menunjukkan bahwa setiap pencipta memiliki kekuasaan penuh atas ciptaannya, sehingga ia mempunyai hak untuk mendapatkan manfaat baik materi ataupun moril dari karya ciptanya tersebut.

Ikatan hukum menghubungkan manusia dan manusia dengan benda-benda disekelilingnya. Hubungan yang tak terhingga banyaknya itu menghubungkan manusia sewaktu lahir, kawin, dalam perdagangan dan jasa lainnya yang berhubungan dengan kehidupan manusia sehari-hari seperti sandang, pangan dan papan. Semua hubungan pergaulan tersebut berkat jasa dari hukum itu sendiri atau sebaliknya hukum mempunyai peranan yang penting untuk manusia bermasyarakat. Dalam aturan normatif, praktek sewa-menyewa sebenarnya telah ada sejak zaman Rasulullah. Hal ini diperbolehkan atas dasar Al-Qur'an ataupun Hadits. Seperti dalam firman Allah :

---

<sup>15</sup> Abdullah Al-Muslih dan Shalah Al-Shawi, *Fikih Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haqq, 2009) hlm. 319

الْأَمِينُ الْقَوِيُّ اسْتَأْجَرْتَ مِنْ خَيْرِ إِنْ ۖ اسْتَأْجَرَهُ أَبَتِ يَا إِحْدَاهُمَا قَالَتْ

Artinya : salah seorang dari kedua wanita itu berkata “ya bapakku, ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik, yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita), ialah orang yang kuat, lagi dapat dipercaya. (QS. Al Qashash [28] 26)

عَرَقُ يَجِفُّ نَأْ قَبْلَ أَجْرِهِ الْأَجِيرَ أَعْطُوا

“Berilah upah kepada para pekerja sebelum mengering keringatnya.” (Riwayat Ibnu Majah)

Sewa menyewa yang di syari’atkan dalam Islam diantaranya tidak ada unsur penipuan, dan yang dapat merugikan pihak lain. Oleh karena itu, dalam menjalankan suatu kegiatan muamalah seperti sewa-menyewa diperlukan beberapa syarat yang harus dipenuhi yaitu:<sup>16</sup>

- a) Persewaan tersebut harus pada pemanfaatan barang.
- b) Manfaat barang yang disewakan harus diketahui. Tidak boleh persewaan atas barang yang telah disewakan.
- c) Barang yang disewakan harus barang yang dapat disewakan atau dapat dipinjamkan. Tidak boleh menyewakan barang-barang yang tidak ada wujud dan bukan miliknya.
- d) Manfaat barang yang disewakan ada dua, manfaat menggunakan waktu dan pekerjaan.

Namun diperbolehkannya sewa-menyewa dalam Islam dibatasi dengan adanya hukum syara’ itu sendiri. Majelis Ulama Indonesia dalam Fatwa MUI

---

<sup>16</sup> Ahmad Isa’ Asyur, *Fiqh Islam Praktis...* hlm.98

Nomor :1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang Hak Kekayaan Intelektual mengeluarkan pertimbangan sebagai berikut :

(a) Bahwa dewasa ini pelanggaran terhadap Hak Kekayaan Intelektual telah sampai pada tingkat sangat meresahkan, merugikan dan membahayakan banyak pihak, terutama pemegang hak, negara dan masyarakat.

(b) Bahwa terhadap pelanggaran tersebut, Masyarakat Indonesia Anti Pemalsuan (MIAP) telah mengajukan permohonan Fatwa kepada MUI.

Bahwa oleh karena itu, MUI memandang perlu menetapkan Fatwa tentang status hukum Islam mengenai HKI, untuk dijadikan pedoman bagi umat Islam dan pihak-pihak yang memerlukannya.

Undang-undang Indonesia yang mengatur masalah hak cipta, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pada Pasal 8 disebutkan “Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan”. Begitupun pada Pasal 9 ayat 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 “Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan”. Sanksi yang tercantum pada Pasal 114 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 yaitu “Setiap Orang yang mengelola tempat perdagangan dalam segala bentuknya yang dengan sengaja dan mengetahui membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”

Undang-undang hak cipta memberikan pilihan penyelesaian hukum bagi pencipta atau pemegang hak cipta yang haknya dilanggar oleh pihak lain. Mekanisme penyelesaian bagi pencipta yang ingin mempertahankan haknya: Pertama, gugatan perdata yang mekanismenya diatur di dalam Pasal 82 UUHC. Pemegang hak cipta berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada pengadilan niaga atas pelanggaran hak ciptaannya dan meminta penyitaan terhadap benda yang diumumkan atau hasil perbanyakan ciptaan itu. Pemegang hak cipta juga berhak memohon kepada pengadilan niaga agar memerintahkan penyerahan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukan atau pameran karya, yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta. Sebelum menjatuhkan putusan akhir dan untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar, HKI dapat memerintahkan pelanggar untuk menghentikan kegiatan pengumuman dan/atau perbanyakan ciptaan atau barang yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta.

Dalam Islam, hukum Islam mempunyai arti segenap aspek kehidupan merupakan upaya pemahaman terhadap agama itu sendiri. Dengan demikian, hukum Islam adalah satu-satunya perantara, dalam Islam yang dapat memberi legitimasi (sejauh mana masyarakat menerima dan mengikuti aturan) terhadap sistem sosial atau tata nilai yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat.<sup>17</sup> Hal ini disebabkan karena Islam bukan saja membawa hukum yang baru, tetapi juga membenarkan hukum dan sistem sosial yang telah ada dan selama itu tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum Islam.

## **F. Langkah-langkah Penelitian**

---

<sup>17</sup> Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam I* (Yogyakarta : UII Press, 2011) hlm.108



Dalam melakukan penelitian diperlukan metode yang sesuai dengan perkara yang diteliti, supaya penelitian dapat berhasil dengan baik dan dapat dipertanggung jawabkan. Adapun langkah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara dalam proses penelitian awal yakni, tahapan untuk mendapatkan data-data yang riil dari lapangan secara langsung. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field studies*), dimana penelitian langsung terjun ke lapangan (masyarakat) untuk memperoleh data yang lengkap dan valid mengenai praktek sewa menyewa perangkat lunak komputer (*software*) di retail Grand Computer dan di kota Bekasi.

#### 2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di pasar elektronik Bekasi Cyber Park di Jl. KH. Noer Ali No 177 Kayuringin Jaya Bekasi Selatan, Kota Bekasi.

#### 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, dimana dalam pendekatan ini pembahasan yang ada dalam penelitian ini mengacu pada timbal balik antara perubahan hukum Islam dan masyarakat, dan sebaliknya dimana perubahan masyarakat menyebabkan terjadinya perubahan hukum terhadap perilaku pelanggaran aturan hak cipta.

#### 4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan adalah data kualitatif yaitu bertujuan untuk menghasilkan data deskriptif, berupa kata-kata lisan atau dari orang-orang dan perilaku mereka yang dapat diamati dan kemudian di analisa. Sumber data

penulis menyesuaikan dengan objek penelitian yang telah ditentukan. Sumber data yang telah digunakan yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber Data Primer

yaitu data yang mejadi bahan utama penelitian yang dilakukan dan diperoleh langsung oleh peneliti yakni data yang di dapat dari Grand Computer, datayang di dapat dari masyarakat pengguna *software* tidak berlisensi serta wawancara kepada pemilik retail dan pelanggan Grand Computer. Mengacu pada sumber data yang dipandang responsif dan selaras dengan tujuan penelitian, karena penelitian ini merupakan penelitian kualitatif.

b. Sumber data sekunder

yaitu sumber data yang mencangkup data-data penunjang dalam penelitian ini, yang didapat berupa buku, majalah, karya ilmiah (skripsi, tesis), jurnal, dan sumber-sumber lain yang berkaitan.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi (pengamatan)

Metode observasi adalah deskripsi kerja lapangan, kegiatan, perilaku, tindakan, percakapan, interaksi interpersonal, organisasi atau proses masyarakat, atau aspek lain dari pengalaman manusia yang dapat diamati. Data terdiri dari catatan lapangan: deskripsi rinci, termasuk konteks di mana pengamatan dilakukan.<sup>18</sup>

b. Interview (wawancara)

---

<sup>18</sup> Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2012), hlm. 65

yaitu mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada informan. Wawancara dilakukan kepada orang-orang yang terlibat dalam praktek sewa-menyewa *software windows*, baik pemilik toko maupun konsumen.

c. Studi Kepustakaan

adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi obyek penelitian pada pelaksanaan sewa-menyewa yakni diantaranya, mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip buku, surat kabar, majalah, presentasi, notulen rapat, agenda dan sebagainya.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis data kualitatif, yaitu menganalisis data yang ada ke dalam bahasa kata-kata atau kalimat yang bertujuan untuk memperoleh keterangan yang tuntas dan terperinci. Tentunya dalam hal ini mengenai persoalan sewa menyewa *software* berhak cipta berdasarkan perspektif hukum islam.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG